

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Cahyani, T. D. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan. (2017). *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diantha. I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Predana Media Group.
- Ecep Nurjamal, S. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana Dilengkapi UU KUHP baru*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Feby Rita Fiantika, d. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Husin, K. dan B. R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Krismen. Y. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Kristiana, Y. (2006). *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Marwan Effendy, S. (2005). *Kejaksaan RI | Poisis dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moertiono. (2024). *Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing*. In Pustaka Prima.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, R. J. (2020). *Kewenangan kejaksaan mewakili pemerintah dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Panjaitan, H. (2020). *Kemahiran Beracara Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, H. M. (2015). *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. In *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Rahim, M. I. (2022). *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*. Makasar: Humanities Genius.
- Roni Efendi, H. R. (2023). *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

- Sudiarto, S. M. (2021). *Penghantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sukardi. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Akasara.
- Surachman, D. J. (2017). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offsite.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wisnu Murtopo Nur Muhamad. (2023). *Problematisasi Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Ahadi, L. M. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 110-127.
- Ario Feby Ferdika, F. M. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1-20.
- Akbar, Y. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Mataram. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1689–1699.
- Darmika, I. (2019). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra*, 430.
- Delia Bazlina, A. B. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PN JKT PST. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4673-4683.
- Erwin, S. P. (2021). Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 466.
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, 2(4), 52–64.
- Harjanto, D. A., & Sukma, D. P. (2024). Efektivitas Peran Jaksa Sebagai Eksekutor Atas Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(2), 103–115.
- Irianto dkk, (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 71–78.
- Joshua, P., & Raja, L. (2024). Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan. 4, 6022–6031.
- Khaira dkk. (2023). Bukti Minuman Keras Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. 8(2), 338–355.

- Mangku, N. P. (2022). Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory. *Unnes Law Jurnal*, 251.
- Mangku, D. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng . *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 353.
- Mosal, dkk (2024). Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana 10*(September), 652-661
- Nandihanta & Laksana. (2020). *Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang The Role And Function Of Prosecutors In The Implementation Of The Extinction Of Goods Evidence Of Narcotics In The City Of Semarang*. 293–309.
- Ngurah Ardhya, I. D. (2025). Pelatihan Mediasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod. *Senadimas | Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1676.
- Nurlia. (2019). Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi /Harapan Dengan Hasil Kerja). *Meraja Journal*, 51-66.
- Nuraini, N., & Kartika, O. N. (2024). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. *Wajah Hukum*, 8(1), 395.
- Parwati, N. P. (2024). Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 10.
- Renfan, N. H. (2023). Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan. *Matakoa Corruption Law Review*, 1(2), 140–150.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Presumption Of Law*, 18-24.
- Ramadani, R. M. (2020). Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi. *Wacana Paramarta| Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Santi Dkk, (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(3), 216–226.

- Simare-Mare, E. D. (2025). *Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Putusan 108/Pid B/2024/Pn Tjg)*. Universitas Hkbp Nommensen.
- Sofwan, S. V., & Sulastri, T. (2019). Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 151–165.
- Sucipto Dkk (2022). Sistem Informasi Barang Bukti Dan Barang Rampasan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 3(2), 1–12.
- Sanusi, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 . Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 27.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi| Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 4.
- Supardi, E. A. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 1,25.
- Subadra, D. G. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Masyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 128.
- Sugi Hartono, & N. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 287.
- Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018). [Http://Eprints.Unram.Ac.Id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.Pdf](http://Eprints.Unram.Ac.Id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.Pdf)
- Yuliartini, N. P. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara. *Jurnal Komunikasi Hukum* , 85.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Munawaroh. (2024). *Apa Perbedaan Benda Sitaan dengan Barang Bukti?* Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan--lt4e53b67341c54/> (Diakses pada 27 Juni 2025)
- Utama, A. (2024). *Mau ambil barang bukti di Kejaksaan, ini prosedurnya.* Jaksanews.Com. <https://jaksanews.com/mau-ambil-barang-bukti-di-kejaksaan-ini-prosedurnya/> (Diakses Pada 27 Juni 2025)
- Zulkarnain. (2025). *Bagaimana Proses Persidangan Pidana?* Analisisshukum. <https://www.analishukum.com/2025/02/ini-cara-proses-sidang-pidana.html> (Diakses pada 27 Juni 2025)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).
Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/Ja/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017
Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang
Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Kejaksaan
Republik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemulihan Aset di
Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

